



Koran	Hal
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	A6
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wabup Ingatkan OPD Soal RPJMD

Limapuluh Kota, Singgalang

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), menggelar kegiatan diskusi publik rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota yang berlangsung di Ruang Pertemuan Bapelitbang Kabupaten Limapuluh Kota Rabu, (9/5).

Kepala Bapelitbang Kabupaten Limapuluh Kota Widya Putra dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menjangking masukan dalam rangka penyempurnaan penyusunan revisi RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota 2016 - 2021.

"Kegiatan konsultasi publik rancangan awal perubahan RPJMD ialah guna menjangking aspirasi dan masukan sebagai penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan

dalam paparannya sebagai nara sumber mengatakan, dalam penyusunan rancangan awal perubahan RPJMD, peran serta semua pihak sangat dibutuhkan, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan.

"Kami berharap semua pimpinan OPD hadir dalam pertemuan ini, jangan sampai kepala OPD tidak tau dengan apa yang menjadi kontrak kerjanya. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, di sana juga dijelaskan bahwa 70% RPJMD berasal dari visi misi kepala daerah teripih. Untuk itu, keikutsertaan dan peran serta kita adalah sebagai penentu RPJM," kata Ferizal Ridwan. Lebih lanjut, pada kesempatan itu dirinya juga menerangkan latar belakang dilakukannya perubahan RPJMD, yakni berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan daerah, Instruksi Mendagri No.061/2911/SJ Tahun 2016 tentang tindak lanjut PP No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, dan SEB Mendagri No. 050/4936/SJ tentang penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019.

"RPJMD yang terdiri dari 8 Visi, 96 Sasaran, 136 Tujuan dan 300 sekian Indikator, setelah Dua tahun berjalan tak memungkinkan dan program kegiatan itu telah muncul tahun sebelumnya, maka inilah yang akan kita rubah, perubahari ini juga terdiri dari internal atau eksternal, misalnya ada kebijakan Daerah yang tidak sinkron dengan Provinsi dan atau tidak sinkron dengan nawacita, maka itulah yang kita cocokkan," katanya.

Orang Nomor dua di Kabupaten Limapuluh Kota ini juga berharap, rancangan perubahan RPJMD ini agar dapat dipahami dan dimengerti oleh OPD.

Karena Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dapat dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota, karena berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 tahun.

"Kami berharap rancangan perubahan ini agar dipahami oleh OPD, berdasarkan derat hitung dan keberhasilan RPJMD, dapat dilihat dari standar mutu penilaian, atau tingkat kepuasan publik," katanya.

Hadir sebagai nara sumber pada kesempatan itu dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Yuliasman, dan Kabag Organisasi Kabupaten Limapuluh Kota Amran. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala OPD, Camat se Kabupaten Limapuluh Kota, dan Stakeholder terkait. (208)